

Penguatan Kapasitas Kader Desa melalui Pelatihan dan Implementasi Tata Kelola Aplikasi Indramayudesa.Id di Kabupaten Indramayu

Jayanta¹, Widya Cholil^{*2}, Tjahjanto³, Rio Wirawan⁴, Muhammad Azkal Azkia⁵,
Supriyanto⁶, Yun Houy Choo⁷

^{1,2,3,4,5} Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jakarta, Indonesia

⁶ Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tritayasa, Indonesia

⁷Fakulti Kecerdasan Buatan dan Keselamatan Siber (FAIX), Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melaka, Malaysia

*e-mail: : jayanta@upnvj.ac.id¹, widyacholil@upnvj.ac.id^{*2}, tjahjanto@upnvj.ac.id³,
riowirawan@upnvj.ac.id, supriyanto@upnvj.ac.id, huoy@utem.edu.my

Abstrak

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa merupakan fondasi penting dalam mendukung strategi desa digital yang tengah dikembangkan di Kabupaten Indramayu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi kader desa melalui pelatihan dan implementasi beberapa aplikasi digital, antara lain Indramayudesa.Id, Siskeudes, Sistem Informasi Desa (SID), E-Office, Lapor Indramayu, SIPBM, dan SIGAP sebagai bagian dari upaya strategis digitalisasi desa. Program ini dirancang dengan pendekatan pelatihan partisipatif, yang melibatkan sesi teori dan praktik penggunaan aplikasi secara langsung. Materi pelatihan mencakup pengenalan fitur-fitur utama dari masing-masing aplikasi, simulasi pengelolaan data desa, serta strategi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan administrasi desa secara digital sesuai arah kebijakan desa digital Kabupaten Indramayu. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kader desa untuk menjadi agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat terkait literasi digital dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi tersebut. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan kader desa terhadap penggunaan berbagai aplikasi digital, serta tumbuhnya motivasi kader untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam tata kelola desa. Dengan demikian, pelatihan dan implementasi aplikasi-aplikasi digital diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader desa, mendukung strategi desa digital, serta mendorong terwujudnya desa yang lebih transparan, partisipatif, dan inovatif di Kabupaten Indramayu.

Kata kunci: kader desa, literasi digital, aplikasi Indramayudesa.Id, penguatan kapasitas, desa digital

Abstract

Increasing the capacity of human resources at the village level is an important foundation in supporting the digital village strategy that is being developed in Indramayu Regency. This community service activity aims to strengthen the competence of village cadres through training and implementation of several digital applications, including Indramayudesa.Id, Siskeudes, Village Information System (SID), E-Office, Lapor Indramayu, SIPBM, and SIGAP as part of strategic efforts to digitize villages. The program is designed with a participatory training approach, which involves hands-on sessions on theory and practice using the app. The training material includes an introduction to the main features of each application, a simulation of village data management, and strategies for the use of technology to improve public services and village administration digitally in accordance with the direction of the Indramayu Regency digital village policy. In addition, this activity also encourages village cadres to become agents of change in educating the community regarding digital literacy and the use of these applications. The results of monitoring and evaluation showed a significant increase in the understanding and skills of village cadres towards the use of various digital applications, as well as the growth of cadre motivation to integrate digital solutions into village governance. Thus, the training and implementation of digital applications is expected to strengthen the capacity of village cadres, support digital village strategies, and encourage the realization of a more transparent, participatory, and innovative village in Indramayu Regency.

Keywords: Village Cadres, Digital Literacy, Indramayudesa.Id Applications, Capacity Building, Digital Villages

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi pemicu utama transformasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk tata kelola pemerintahan desa di Indonesia (Geohansa et al., n.d.). Digitalisasi desa dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Indramayu merespons perkembangan ini melalui penyusunan strategi desa digital, yang tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai motor utama perubahan (Reis & Melão, 2023; Deng et al., 2024).

Arah kebijakan ini sejalan dengan kerangka nasional yang telah diletakkan oleh pemerintah pusat. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi layanan publik menjadi acuan wajib bagi instansi pusat maupun daerah, termasuk pemerintah desa, dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini kian dipertegas melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas (Smart Village), yang menempatkan data dan teknologi digital sebagai tulang punggung perencanaan, pelayanan publik, ekonomi lokal, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Momentum kebijakan ini turut tergambar dari perbaikan peringkat Indonesia dalam United Nations E-Government Survey, yang naik dari posisi ke-77 pada tahun 2022 menjadi ke-64 dari 193 negara pada tahun 2024 (Kementerian PANRB, 2025). Meski capaian ini menunjukkan tren positif secara nasional, keberhasilannya di tingkat akar rumput sangat bergantung pada bagaimana pemerintah kabupaten menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam strategi implementasi yang kontekstual, termasuk di Kabupaten Indramayu.

Penekanan pada penguatan SDM dalam strategi desa digital bukan tanpa dasar teoretis. Reis dan Melão (2023), dalam kajian meta-review mereka terhadap literatur transformasi digital, menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital pada suatu organisasi—termasuk organisasi sektor publik—jauh lebih ditentukan oleh dimensi organisasional dan sosial ketimbang semata-mata oleh kecanggihan teknologi yang digunakan. Temuan ini diperkuat oleh Yang, Gu, dan Albitar (2024), yang menunjukkan bahwa efisiensi pemerintahan digital meningkat signifikan bukan karena adopsi teknologi yang berjalan sendiri-sendiri di tiap unit, melainkan karena adanya koordinasi lintas unit dalam pemanfaatannya. Dengan kata lain, aplikasi secanggih apa pun tidak akan memberikan dampak optimal apabila aparatur yang mengoperasikannya belum memiliki kapasitas yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, Enaifoghe, Ndebele, Durokifa, dan Thusi (2024) mengidentifikasi kompetensi digital aparatur, kepemimpinan, serta budaya kerja yang adaptif sebagai faktor pendorong utama efektivitas transformasi digital pada manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Kesimpulan yang tidak jauh berbeda turut disampaikan Fan (2023), yang menegaskan bahwa digitalisasi manajemen sumber daya manusia di sektor publik membuka banyak peluang efisiensi, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri apabila tidak diiringi kesiapan kelembagaan dan individu aparatur dalam beradaptasi dengan sistem kerja yang baru. Perspektif-perspektif inilah yang tampak diadopsi Pemerintah Kabupaten Indramayu ketika merumuskan strategi desa digital yang menempatkan penguatan SDM sejajar dengan pembangunan infrastruktur, bukan sekadar sebagai unsur pelengkap.

Salah satu indikator paling nyata dari keberhasilan digitalisasi ini adalah implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil assessment awal, seluruh desa di Kabupaten Indramayu telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan dan administrasi desa secara digital ("Indonesia's Digital Transformation: How E-Government Is Revolutionizing Public Services," n.d.). Capaian penuh ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian di daerah lain yang menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes secara konsisten

berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Hasan dkk., 2024). Meski demikian, sejumlah kajian turut mengingatkan bahwa keberhasilan adopsi suatu aplikasi tidak serta-merta mencerminkan optimalnya pemanfaatan aplikasi tersebut; kompetensi teknis aparatur desa dalam memahami detail sistem kerap kali masih menjadi titik lemah, sehingga pertanggungjawaban operasional cenderung bertumpu pada segelintir staf yang benar-benar menguasai aplikasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adopsi penuh Siskeudes di Indramayu merupakan pencapaian awal yang penting, tetapi belum tentu berbanding lurus dengan kematangan literasi digital aparatur desa secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa keberhasilan Siskeudes yang telah diadopsi secara penuh oleh seluruh desa di Kabupaten Indramayu belum diikuti oleh capaian yang setara pada aplikasi-aplikasi pendukung tata kelola desa lainnya. Kesenjangan antara tingkat adopsi yang mencapai 100% dan tingkat pemanfaatan optimal yang baru menyentuh 45% ini memperkuat urgensi dari strategi desa digital yang disusun Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang secara eksplisit menempatkan penguatan SDM sebagai motor utama perubahan, sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun temuan berbagai literatur mutakhir mengenai transformasi digital pemerintahan (Deng et al., 2024; Mayyora dkk., 2025). Dengan populasi lebih dari 1,8 juta jiwa yang tersebar di 309 desa pada 31 kecamatan, upaya pemetaan kebutuhan dan kapasitas SDM secara sistematis dan berbasis data menjadi langkah yang tidak dapat ditunda, agar digitalisasi desa di Kabupaten Indramayu tidak berhenti pada capaian adopsi teknologi semata, melainkan benar-benar bertransformasi menjadi peningkatan nyata dalam efektivitas pelayanan publik, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemetaan semacam ini pada gilirannya akan menjadi pijakan penting bagi perumusan langkah-langkah lanjutan yang lebih terarah dalam mendukung visi besar Kabupaten Indramayu menuju tata kelola pemerintahan desa yang inklusif dan berbasis teknologi.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dirancang secara sistematis dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan riil kader desa di Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas kader desa melalui aplikasi *Indramayudesa.Id* dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang saling terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika peserta serta lingkungan desa. (Dewantara et al. 2024)

- 2.1. Tahapan pertama adalah identifikasi kebutuhan dan pemetaan kompetensi awal kader desa melalui survei berbasis kuesioner, wawancara, serta Focus Group Discussion (FGD). Instrumen survei difokuskan pada pemetaan tingkat literasi digital, pengalaman penggunaan aplikasi, serta kebutuhan spesifik pelatihan di masing-masing desa. (Salim and Rosyidi 2025) (Rahadian et al. 2022) Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan kurikulum dan modul pelatihan yang kontekstual dan aplikatif.

Tabel 1. Profil Kader Peserta Kegiatan

Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Aparat Desa	12	30
UMKM	10	25
PKK	9	22,5
Pemuda Desa	9	22,5
Total	40	

- 2.2. Tahapan kedua adalah penyusunan modul pelatihan. Materi yang disusun meliputi pengenalan aplikasi *Indramayudesa.Id*, pelatihan operasional aplikasi untuk berbagai kebutuhan administrasi desa, serta studi kasus layanan publik digital desa. (Saptawan and Baharuddin 2024) Materi pelatihan didesain dengan pendekatan praktik langsung (learning

by doing) dan penugasan berbasis proyek. Pedoman atau modul ini merupakan luaran dari kegiatan pelatihan yang dasar penyusunannya menggunakan framework COBIT 2019 yang merupakan salah satu pedoman tata kelola Teknologi Informasi standar International. Adapun konsep modul ini terdiri dari aspek aspek domain seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan COBIT 2019 pada Pelatihan

Domain Cobit 2019	Aspek Pelatihan
BAI09, DSS01	Pengelolaan Data Kependudukan a. Input, edit, dan validasi data warga b. Otomasi rekap data statistik
DSS02, DSS03	Pelayanan Surat dan Administrasi Digital a. Proses permohonan, persetujuan, dan pencetakan surat digital b. Monitoring status layanan secara real time
BAI07, BAI09	Pengelolaan Data UMKM dan Kegiatan Desa a. Registrasi pelaku UMKM Input dan monitoring laporan kegiatan PKK/pemuda
DSS05, MEA01	Keamanan, dan Backup Data a. Praktik backup data rutin Audit akses dan aktivitas aplikasi
DSS01, APO07	Kontrol Akses dan Tanggung Jawab a. Penetapan peran pengguna (admin, operator, user) b. Pengelolaan hak akses sesuai tugas

- 2.3. Tahapan ketiga adalah implementasi pelatihan dengan pendekatan blended learning, menggabungkan sesi tatap muka dan daring. Sesi tatap muka difokuskan pada praktik penggunaan aplikasi digital, simulasi kasus, serta diskusi kelompok untuk mengasah problem solving. (Dewi and Alam 2025) Sementara sesi daring mengakomodasi pendalaman materi, konsultasi individu, dan penguatan jejaring antar kader desa. Masing-masing sesi diakhiri dengan penugasan praktik yang harus dilaksanakan kader di desa masing-masing dan didokumentasikan dalam logbook harian.
- 2.4. Tahapan keempat adalah pendampingan intensif dan pembentukan komunitas belajar digital. Tim pengabdian secara berkala melakukan kunjungan lapangan dan mentoring online guna memastikan penerapan aplikasi berjalan baik, memberikan solusi teknis, serta mendorong kader membentuk komunitas belajar digital di setiap desa. Komunitas ini berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman, diskusi pemecahan masalah, dan penguatan budaya digital secara kolektif. (Louis and Kedieng 2022)
- 2.5. Tahapan kelima adalah evaluasi dan refleksi, yang dilakukan melalui pre-test dan post-test, penilaian praktik, FGD, dan wawancara reflektif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, serta efektivitas implementasi aplikasi Indramayudesa.Id di desa. Hasil penilaian dikompilasi secara kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar pelaporan capaian dan rekomendasi tindak lanjut. (Karmila, Achmad, and Utami 2023). (Hutauruk, Juntara, and Fahmi 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan menerapkan metode blended learning, dengan kombinasi sesi tatap muka dan daring. Setiap sesi pelatihan diakhiri dengan praktik langsung dan simulasi penanganan masalah digital desa, baik di bidang administrasi, UMKM, maupun pengelolaan organisasi PKK dan kepemudaan. (Dahlani and Sulaksono 2024) Kegiatan pendampingan dilakukan selama tiga bulan melalui kunjungan lapangan dan mentoring daring oleh tim

pengabdi. Seluruh proses terdokumentasi dalam logbook harian kader dan laporan mingguan tim. Keberhasilan kegiatan diukur secara kuantitatif menggunakan kuesioner pre-test dan post-test berbasis skala Likert serta data administratif desa. Hasil penilaian dari pre -test dan post test tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Indikator	Pre-test	Post-test
Rata-rata skor pengetahuan/skill digital (0-100)	54,2	81,6
Rata-rata layanan digital/bulan/desa	29	72
Kader mengintegrasikan ≥ 2 aplikasi (%)	28	75
Komunitas belajar terbentuk (dari 20 desa)	5	16

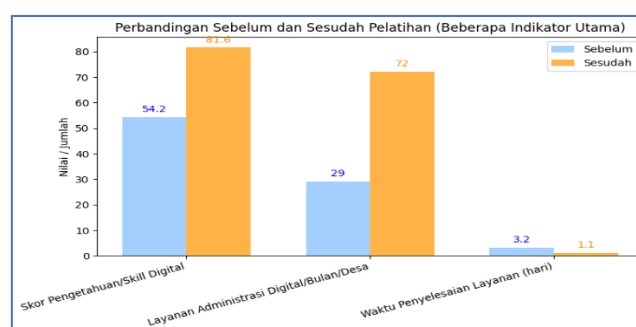
Pada tahap awal, survei kebutuhan dilakukan melalui kuesioner. Adapun instrumen survei yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 1. Dimana hasil assessment menunjukkan bahwa hanya 20% kader pernah mengikuti pelatihan teknologi informasi sebelumnya, dan 60% mengaku belum percaya diri menggunakan aplikasi Indramayudesa.Id maupun Siskeudes secara rutin dalam pelayanan desa dan aktivitas ekonomi masyarakat. Rancangan modul pelatihan disusun berdasarkan temuan ini, memfokuskan pada praktik penggunaan aplikasi digital desa, penguatan literasi digital dasar, serta simulasi kasus riil terkait administrasi dan layanan publik digital (Wijaya et al. 2025). Secara kualitatif, dilakukan FGD lanjutan, wawancara mendalam, dan observasi perilaku kader. Hasilnya, rata-rata skor pengetahuan dan keterampilan digital kader meningkat dari 54,2 menjadi 81,6 (naik sekitar 50%). Rata-rata layanan administrasi digital pada 20 desa naik dari 29 layanan/bulan menjadi 72 layanan/bulan, dan waktu penyelesaian layanan turun dari 3,2 hari menjadi 1,1 hari. Sebanyak 75% kader berhasil mengintegrasikan minimal dua aplikasi digital dalam tugasnya. Komunitas belajar digital terbentuk di 16 desa dari 20 desa perwakilan. Perubahan sikap diukur melalui testimoni, wawancara, dan observasi, menunjukkan 85% kader merasa lebih percaya diri serta siap menjadi agen literasi digital di desanya. Partisipasi masyarakat terhadap layanan digital juga meningkat, terbukti dari peningkatan laporan dan pengaduan yang masuk melalui platform digital desa.

Tabel 4. Rekap Data Hasil Pelatihan Kader Desa

Indikator	Pre-test	Post-test
Kader pernah ikut pelatihan TIK (%)	20	0
Kader belum percaya diri pakai aplikasi Indramayudesa.Id/Siskeudes	60	0
Rata-rata skor pengetahuan/skill digital (skala 0-100)	54,2	81,6
Rata-rata layanan administrasi digital/bulan/desa	29	72
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi (hari)	3,2	1,1
Kader mengintegrasikan ≥ 2 aplikasi digital (%)	29	72
Rata-rata waktu penyelesaian layanan administrasi (hari)	0	16
Kader lebih percaya diri & siap jadi agen digital (%)	0	85

Selain pengukuran berbasis tes, penilaian praktik juga dilakukan secara sistematis. Penilaian praktik didasarkan pada ketuntasan dan kualitas tugas praktik yang dikumpulkan oleh setiap kader serta dokumentasi aktivitas harian melalui logbook. Dari hasil evaluasi, diperoleh data bahwa sekitar 75% kader mampu menyelesaikan tugas praktik secara mandiri dan benar, misalnya dalam hal penginputan data desa, pelayanan administrasi digital, hingga penyusunan laporan kegiatan secara online(Molnár 2023) . Selain itu, peningkatan jumlah layanan digital

yang dikelola kader pun terlihat nyata, dengan rata-rata layanan digital per desa meningkat dari 29 menjadi 72 layanan per bulan setelah pelatihan. Untuk menilai perubahan sikap, kepercayaan diri, dan motivasi kader dalam memanfaatkan aplikasi digital, dilakukan wawancara refleksi secara individu dan Focus Group Discussion (FGD) secara kelompok. (Ratri and Aviyanti 2025) Dari hasil wawancara dan FGD, 80% kader mengaku lebih percaya diri dalam mengoperasikan aplikasi, merasa termotivasi untuk terus belajar teknologi baru, dan siap menjadi agen perubahan digital di desanya. Banyak kader juga membagikan pengalaman positif, mulai dari semakin mudahnya pelayanan masyarakat hingga lahirnya kerja sama baru antar kader lintas sektor. Seluruh data hasil penilaian, baik dari pre-test, post-test, tugas praktik, logbook, maupun wawancara, kemudian direkapitulasi dan dianalisis. Hasil analisis ini disusun dalam bentuk laporan capaian kegiatan yang tidak hanya menyoroti keberhasilan, tetapi juga memuat rekomendasi pengembangan ke depan. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi bersama untuk perbaikan program pelatihan berikutnya dan strategi penguatan digitalisasi desa secara berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.



Gambar 1. Diagram penilaian kompetensi peserta

Gambar 1. di atas menyajikan bukti empiris yang secara langsung menguatkan argumen yang dibangun dalam narasi pendahuluan, khususnya terkait penempatan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai motor utama perubahan dalam strategi desa digital Kabupaten Indramayu. Ketiga indikator yang ditampilkan skor pengetahuan/skill digital, jumlah layanan administrasi digital per bulan per desa, dan waktu penyelesaian layanan secara konsisten menunjukkan perubahan positif setelah pelatihan dilaksanakan, sehingga data ini dapat dibaca sebagai gambaran nyata dari apa yang terjadi ketika strategi yang dirumuskan pada tahap kebijakan benar-benar diimplementasikan hingga ke level aparatur desa.

Pada indikator pertama, skor pengetahuan/skill digital aparatur mengalami kenaikan dari 54,2 menjadi 81,6, atau meningkat sekitar 50,6%. Temuan ini selaras dengan argumen Pitrianti dkk. (2023) bahwa literasi digital di lingkungan desa sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia itu sendiri, dan juga memperkuat kesimpulan Enaifoghe dkk. (2024) serta Fan (2023) bahwa kompetensi aparatur menjadi prasyarat utama sebelum teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif. Kenaikan lebih dari 27 poin ini juga sejalan dengan temuan Akmal (2024), yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi terbukti efektif meningkatkan kapasitas aparatur desa di era digital. Dengan kata lain, angka ini bukan sekadar peningkatan skor semata, melainkan indikasi bahwa kesenjangan kompetensi yang menurut Reis dan Melão (2023) menjadi salah satu penghambat utama keberhasilan transformasi digital mulai dapat dijembatani melalui intervensi pelatihan yang terstruktur.

Pada indikator kedua, jumlah layanan administrasi digital yang diselesaikan meningkat tajam dari 29 menjadi 72 layanan per bulan per desa, atau naik sekitar 148%, hampir dua setengah kali lipat dari kondisi sebelumnya. Temuan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan yang diangkat dalam narasi pendahuluan, yaitu kesenjangan antara tingkat adopsi Siskeudes yang telah mencapai 100% dengan tingkat pemanfaatan optimal aplikasi lain seperti Indramayudesa.id, SID, E-Office, Lapor Indramayu, SIPBM, dan SIGAP yang baru menyentuh angka 45%. Sebagaimana dicatat Amiril dan Choiriyah (2024), tantangan utama digitalisasi desa memang lebih banyak terjadi pada tahap pascaimplementasi, ketika aplikasi

sudah tersedia tetapi pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan kapasitas aparatur. Data pada grafik ini menunjukkan bahwa ketika keterbatasan tersebut diatasi melalui pelatihan, volume layanan yang dapat diproses secara digital dapat meningkat secara signifikan, sehingga memberi indikasi awal bahwa strategi penguatan SDM berpotensi menjadi jalan keluar bagi kesenjangan 45% yang disinggung sebelumnya.

Pada indikator ketiga, waktu penyelesaian layanan menurun dari 3,2 hari menjadi 1,1 hari, atau berkurang sekitar 65,6% setara dengan pemangkasan waktu tunggu masyarakat hingga lebih dari dua hari untuk setiap urusan administrasi. Percepatan semacam ini konsisten dengan pola yang juga ditemukan pada program edukasi digitalisasi desa di Desa Lamunre Tengah, Kabupaten Luwu, tempat rata-rata waktu pelayanan berhasil dipangkas dari 15 menit menjadi kurang dari 5 menit setelah masyarakat dan aparatur desa memperoleh pendampingan digital (M. N. Akbar 2024). Capaian ini juga relevan dengan temuan Yang, Gu, dan Albitar (2024) bahwa efisiensi pemerintahan meningkat signifikan ketika transformasi digital didukung koordinasi dan kesiapan sumber daya yang memadai, bukan sekadar tersedianya aplikasi semata. Dalam konteks tujuan awal digitalisasi desa yang disebutkan pada bagian pendahuluan yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat, penurunan waktu penyelesaian layanan ini merupakan indikator paling konkret bahwa tujuan tersebut mulai tercapai di lapangan.

Secara keseluruhan, ketiga indikator dalam grafik ini saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan bukti bahwa penguatan SDM, sebagaimana ditekankan dalam strategi desa digital Kabupaten Indramayu, bukan sekadar slogan kebijakan, melainkan variabel yang benar-benar berdampak terukur terhadap kinerja pelayanan desa. Kenaikan skor pengetahuan digital mencerminkan peningkatan kapasitas individu aparatur; kenaikan volume layanan administrasi digital mencerminkan perubahan pada level pemanfaatan sistem; sementara penurunan waktu penyelesaian layanan mencerminkan dampak akhir yang paling langsung dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan. Ketiganya bersama-sama memberikan pembenaran empiris bagi argumen yang telah dibangun dalam narasi pendahuluan, sekaligus menjadi dasar bagi rekomendasi bahwa pemetaan dan penguatan kapasitas SDM aparatur desa perlu terus diperluas secara sistematis ke seluruh 309 desa di Kabupaten Indramayu, agar kesenjangan pemanfaatan aplikasi digital yang saat ini masih berada pada angka 45% dapat didorong mendekati capaian Siskeudes yang telah mencapai keberhasilan penuh.

Keunggulan utama luaran kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan kader lintas sektor (aparatur desa, UMKM, PKK, dan pemuda) dalam menggunakan aplikasi digital secara nyata dan berkelanjutan. (M. Akbar and Wijaya 2024) Program ini juga mendorong yang dihadapi adalah ketimpangan kesiapan infrastruktur internet di beberapa desa, terutama di terbentuknya ekosistem digital desa yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sehingga mempercepat transformasi tata kelola pelayanan publik dan ekonomi desa. (Sugihono and Samsi 2024). Kelemahan wilayah pesisir atau desa dengan sinyal terbatas, yang menyebabkan beberapa kader kesulitan mengakses pelatihan daring dan mengoperasikan aplikasi secara konsisten. Selain itu, keberagaman tingkat pendidikan dan pengalaman kader menyebabkan kecepatan adaptasi berbeda-beda, sehingga perlu penyesuaian strategi pendampingan (Nafi, Fauziati, and Supriyadi 2022).



Gambar 2. (a),(b) dan (c) *Kegiatan Pelatihan pelatihan dan pendampingan Penguatan Kapasitas Kader Desa di Kabupaten Indramayu*

4. KESIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan implementasi aplikasi Indramayudesd.Id di Kabupaten Indramayu terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan digital kader desa, yang tercermin dari kenaikan signifikan skor pengetahuan, keterampilan, dan jumlah layanan administrasi digital. Efisiensi pelayanan dan perubahan sikap positif juga terwujud, di mana mayoritas kader kini lebih percaya diri serta aktif membentuk komunitas belajar digital. (Indonesia's Digital Transformation: How E-Government is Revolutionizing Public Services n.d.) Keunggulan kegiatan ini terletak pada pendekatan partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan kader yang beragam. Untuk memastikan keberlanjutan, diperlukan pertemuan rutin, pemanfaatan platform digital, serta SOP pendampingan yang terstruktur. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata skor pengetahuan dan keterampilan digital kader dari 54,2 menjadi 81,6, serta peningkatan jumlah layanan administrasi digital yang dikelola oleh desa dari 29 menjadi 72 layanan per bulan. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, penguatan infrastruktur digital, pelatihan lanjutan, dan pendampingan berkesinambungan akan membentuk ekosistem desa digital yang inklusif, tangguh, dan siap menghadapi tantangan era digital di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas dukungan finansial serta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu atas dukungan fasilitasi, dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA(Hieng, Putu, and Prabawati 2025)

- Akbar, Maulana, and Gustaf Wijaya. 2024. "Digital Literacy of Rural Areas in Indonesia: Challenges and Opportunities." doi:10.4108/eai.1-11-2023.2344347.
- Akbar, Milad Naufal. 2024. "P ENINGKATAN L ITERASI D IGITAL M ELALUI E DUKASI." 6: 28–34.
- Dahliani, Yani, and Hary Sulaksono. 2024. "Integrated Business Mentoring : Efforts to Improve Sustainable Business , in Mlokorejo Village , Jember , Indonesia." 2(2): 88–94.
- Dewantara, Alif, Ahmad Herlyasa, Sosro Pratama, and Andik Pratama. 2024. "Strengthening Community Businesses Creative Digital Promotion and Education Through." 2(1): 16–22.
- Dewi, Erni Ratna, and Andi Aminullah Alam. 2025. "AI Literacy , Digital Self-Efficacy , and

- Learning Resilience as Predictors of Academic Success Across Urban and Rural Students.” 11(2): 60–70.
- Hieng, Beatrix Brightany, Ni Putu, and Anik Prabawati. 2025. “DIGITAL TRANSFORMATION IN VILLAGES : A POLICY IMPLEMENTATION APPROACH IN KAJOWAIR VILLAGE , NUSA TENGGARA TIMUR.” 2(2): 189–98.
- Hutauruk, Rosinta Paulina, Bendi Juantara, and Ade Fahmi. 2021. “Digital Transformation in Rural Governance : A Case Study of E- Government Implementation in Sukamakmur Village , Bogor.” 06(02): 87–92.
- “Indonesia’s Digital Transformation: How E-Government Is Revolutionizing Public Services.” *Indonesia Discourse* 2(1 SE-Articles): 107–34. doi:10.15294/indi.v2i1.23037.
- Karmila, Widya, Sari Achmad, and Unga Utami. 2023. “Sense-Making of Digital Literacy for Future Education Era : A Systematic Literature Review.” 11(1): 47–53.
- Louis, Jean, and Fendji Kedieng. 2022. “From Community Network to Community Data : Towards Combining Data Pool and Data Cooperative for Data Justice in Rural Areas 1 Introduction 2 Data Justice in Rural Areas 2 . 1 Data Justice : Concepts and Pillars.”
- Molnár, Csilla. 2023. “ORGANIZATIONAL STRATEGIES AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES TO SUPPORT THE IMPROVEMENT OF EMPLOYEE WELL-BEING.” 10(5).
- Nafi, Nahar Nurun, Endang Fauziati, and Slamet Supriyadi. 2022. “International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Exploring the Digital Literacy of Indonesian Generation Z Teachers in English Instruction.” : 217–25.
- Rahadian, Dian, Selfester Lay, Imas Nita Astuti, and Eneng Diana. 2022. “Building and Developing Digital Learning Literacy Skills during the Pandemic (Creating Computer- and Mobile-Based Learning Multimedia) at the Education Office Coordinator of Cisurupan District.” 3: 149–55.
- Ratri, Safitri Yosita, and Lina Aviyanti. 2025. “Unlocking Digital Literacy in Indonesia : Insights from the Use of Social Media Platforms.” 13(1): 191–200.
- Salim, M, and Zudan Rosyidi. 2025. “Digital Literacy Development Towards Golden Indonesia.” 5(3): 837–45. doi:10.58737/jpled.v5i3.539.
- Saptawan, Ardiyan, and Tawakkal Baharuddin. 2024. “Empowering Digital Citizenship in Indonesia : Navigating Urgent Digital Literacy Challenges for Effective Digital Governance.” 11(2): 142–55.
- Sugihono, Chris, and Sunarru Samsi. 2024. “Digital Literacy Among Agricultural Extension Agents in North Maluku , Indonesia.” 42(6): 417–29.
- Wijaya, Abung Supama, Hudi Santoso, Wahyu Budi Priatna, Ahmad Aulia, Abung Supama Wijaya, Hudi Santoso, Wahyu Budi Priatna, and Ahmad Aulia. 2025. “Application of the Design Thinking Concept in the Design of Digital Content for the Smart Village Program in Kertayasa Village Application of the Design Thinking Concept in the Design of Digital Content for the Smart Village Program in Kertayasa Village.” 14(1): 1–15.

Halaman ini dikosongkan